

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPARASI)

Hasni Noor

**Dosen, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin; Kalimantan Selatan,
Indonesia**

hasninoor@uin-antasari.ac.id

Abstrak

Negara memiliki peran penting dalam perkembangan Pendidikan yang kemudian diatur dalam undang-undang maupun aturan yang mengikat dan mengarahkan sistem pendidikan ke arah yang diinginkan oleh negara. Indonesia dan Malaysia merupakan negara dengan penduduk yang memiliki karakteristik yang hampir sama sehingga membuka peluang Kerjasama yang baik antar kedua negara dalam membangun Kerjasama dalam bidang Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara penerapan Pendidikan Islam di Indonesia dengan di Malaysia. Dalam penelitian ini membahas isu yang mencakup persamaan dan perbedaan berdasarkan keberadaan dan penerapan, serta hal-hal dominan dan substansial yang dianggap sebagai faktor penunjang penyebab penerapan Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia. Studi ini memakai metode riset literatur dengan pendekatan kualitatif. Studi ini memaparkan kebijakan dari kedua negara terhadap Pendidikan Islam termasuk tujuan serta sasaran mereka dan mempelajari kemajuan Pembelajaran Islam di Indonesia ataupun Malaysia berlandaskan fakta sejarah serta situasi dikala ini. Hasil dari studi ini yakni pendidikan Islam memiliki kedudukan penting dalam memajukan kedua negara, serta karena itu diberikan posisi khusus dalam undang- undang pendidikan nasional di kedua negara ini.

Kata kunci—Pendidikan Islam, Keberadaan, Penerapan

Abstract

The state has an important role in the development of education which is then regulated in laws and regulations that bind and direct the education system in the direction desired by the state. Indonesia and Malaysia are countries with populations that have almost the same characteristics, thus opening up opportunities for good cooperation between the two countries in building cooperation in the field of education. This study aims to determine the comparison between the application of Islamic education in Indonesia and in Malaysia. This study discusses issues that include similarities and differences based on their existence and application, as well as dominant and substantial matters which are considered as supporting factors causing the application of Islamic education in Indonesia and Malaysia. This study uses a literature research method with a qualitative approach. This study describes the policies of the two countries towards Islamic education including their goals and objectives and studies the progress of Islamic learning in Indonesia or Malaysia based on historical facts and the current situation. The result of this study is that Islamic education has an important position in advancing the two countries, and therefore it is given a special position in the national education laws in these two countries.

Keywords—Islamic Education, Existence, Application

PENDAHULUAN

Pendidikan memenuhi tujuan studi banding hanya jika dikaitkan dengan masyarakat dan negaranya. Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai upaya mengembangkan potensi peserta didik, tetapi juga dilihat dari hubungannya dengan individu, masyarakat dan negaranya. Setiap orang memiliki konsep yang berbeda tentang tujuan pendidikan yang ingin mereka capai, yang belum tentu disepakati oleh masyarakat luas lainnya.¹ Oleh karena itu, setiap teori pendidikan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Namun, bukan berarti suatu masyarakat atau negara harus menolak konsep pendidikan orang lain atau mengabaikan komponen serupa dalam teori pendidikan orang lain.²

Demikian pula, pendidikan Islam suatu negara merupakan cerminan dari filosofi dan media sosial yang membawa serta filosofi Islam negara tersebut. Tentu saja, mungkin ada kesamaan dalam keberadaan dan implementasi pendidikan Islam di beberapa negara. Namun, karena adanya perbedaan budaya, politik, masyarakat, ekonomi, dan latar belakang lembaga pendidikan, serta aliran pemikiran yang dianut umat Islam, lembaga pendidikan tentu akan dibedakan satu sama lain.³

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang berasal dari satu keluarga dan keduanya merupakan anggota ASEAN. Indonesia yang berprinsip Pancasila dan mayoritas penduduknya beragama Islam, serta Malaysia yang telah menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, menyelenggarakan pendidikan Islam di lembaga-lembaga pendidikannya dan juga memeliharanya dalam konstitusinya.⁴

Kajian ini cukup penting untuk mengetahui bagaimana pendidikan Islam diajarkan di Indonesia dimana Pancasila sebagai prinsip negara yang secara resmi mengakui enam agama yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu. Sedangkan Malaysia sebagai negara federal kerajaan hanya mengakui Islam sebagai agama resmi negara. Oleh karena itu, penelitian ini

¹ Abdul Kadir, "Sejarah Pendidikan Islam Cite this paper Related papers," *Sejarah Pendidikan Islam: Dari Masa Rasulullah hingga Reformasi di Indonesia*, 2015.

² Asmawati Suhid dkk., "Pendidikan untuk Semua: Amalannya dalam Sistem Pendidikan Islam di Malaysia," *International Journal of Education and Training (InJET) International Journal of Education and Training (InJET) International Journal of Education and Training* 1, no. 12 (2015): 1–7.

³ M. Y. A Bakar, "Problematika Pendidikan Islam di Indonesia," *DIRASAT Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam*, 2015.

⁴ Maimun Aqsha Lubis & Siti Aisyah Romli Masyurah Mohamad Rawi, Harun Baharudin, "Diterbitkan di Malaysia Fakulti Pendidikan," *Proceeding The 7th International Workshop And Conference Of Asean Studies On Islamic And Arabic Education And Civilization (POLTAN -UKM-POLIMED)* 1, no. 12 (2015).

cukup signifikan untuk mengetahui keberadaan dan implementasi pendidikan Islam di kedua negara.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Deskripsi kualitatif (QD) adalah label yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk studi yang bersifat deskriptif, terutama untuk memeriksa perawatan kesehatan dan fenomena terkait keperawatan (Polit & Beck, 2009, 2014). Penelitian deskriptif biasanya didefinisikan sebagai jenis penelitian Kuantitatif, meskipun penelitian kualitatif juga dapat digunakan untuk tujuan deskriptif. Desain penelitian harus dikembangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hasilnya valid dan dapat diandalkan.⁶

Metode studi kepustakaan adalah metode pengumpulan beberapa data yang diperoleh melalui catatan, karya, atau gambar. Dengan demikian, pembahasan atau data yang diperoleh merupakan hasil eksplorasi dari beberapa sumber bacaan yang relevan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian tentang keberadaan pendidikan Islam di Indonesia akan berkaitan dengan sejarah Islam di Indonesia. Umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia, memulai sejarahnya dengan masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke delapan atau tahun kedua Hijrah di Barus, Sumatera bagian barat (sesuai dengan seminar tentang masuknya Islam ke Indonesia yang diadakan di Medan tahun 1963). Butuh proses panjang hingga kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh pada abad ke-10 akhirnya berdiri.⁸

Dengan demikian, pendidikan Islam melalui dakwah berkembang tanpa memiliki tempat tersendiri dalam jangka waktu yang lama. Setelah beberapa waktu, ia menjadi terletak di tempat seperti rumah, tempat suci, atau masjid (dilakukan dalam juz 'amma/al-Qur'an belajar atau studi kitab seperti tauhid, fiqh, tafsir, hadits).⁹ Hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama hingga

⁵ Saiful Akhyar Lubis, "ISLAMIC EDUCATION IN INDONESIA AND MALAYSIA: THE EXISTENCE AND IMPLEMENTATION UNTIL 20th CENTURY," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 1, no. 1 (2017): 1–12, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v1i1.448>.

⁶ Jozef Raco, "Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya," 2018, <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.

⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif," 2017.

⁸ Firdaus Wajdi, "Literacy Culture in the Islamic Religious Education and the Development of Islam in Indonesia," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2020): 171–88, <https://doi.org/10.21009/004.2.02>.

⁹ Sarno Hanipudin, "Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa," *Matan : Journal of Islam and Muslim Society* 1, no. 1 (2019): 39, <https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>.

pesantren akhirnya dibangun. Meskipun tidak dapat dipastikan kapan dan dimana pesantren pertama kali didirikan, namun menurut sejarah dapat diketahui bahwa pada abad ke-15, pesantren telah dibangun oleh Raden Fatah di Jawa Timur, juga oleh Rangkang di Aceh pada masa Sultan Iskandar. Pemerintah Muda (1607-1636) dan Surau di Minangkabau pada pertengahan abad ke-17, dan Pondok di Jawa Barat.¹⁰

Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam (disebut sebagai mata pelajaran agama) tidak dimasukkan dalam kurikulum. Pendidikan Islam hanya diberikan sebagai mata pelajaran tambahan di sekolah swasta seperti HIS met de qur'an, atau Mulo met de qur'an. Hal ini didasarkan pada kebijakan pemerintah dalam bab 172 (2) I.S (Indische Staatsregeling) menyatakan bahwa: pengajaran umum bersifat netral, artinya diberikan sehubungan dengan keyakinan individu, dan pengajaran agama hanya dapat diberikan di luar jam sekolah.¹¹ Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah mulai memberikan perhatian ekstra pada mata pelajaran agama (walaupun hanya sebagai hinaan). Hal itu diwujudkan dalam bentuk kunjungan ke pesantren-pesantren, termasuk mata pelajaran akhlak (identik dengan ajaran Islam) di sekolah-sekolah negeri, dan pemberian tunjangan untuk membangun sebuah SMA Islam di Jakarta yang dipimpin oleh K.H Wahid Hasyim, Kahar Muzakar dan Bung Hatta.¹²

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, melalui Departemen Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, pemerintah mulai melaksanakan renovasi pendidikan di sekolah-sekolah, termasuk pengajaran agama, madrasah dan pesantren. Berdasarkan Surat Pernyataan Pemerintah Nomor: 1/SD/1946 tanggal 3 Januari 1946 tentang Pembentukan Departemen Agama, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: 1185/KJ tanggal 20 November 1946 tentang Pendidikan Agama, pendidikan untuk sekolah umum secara resmi dikelola oleh pemerintah pada bulan Desember 1946.¹³ Penyelenggaraan pendidikan agama secara formal dan kelembagaan diselenggarakan oleh Departemen Agama dan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Kedua kementerian tersebut tertuang dalam konstitusi dalam No: 1142/Bag. A (Ajaran) dan No: 1285/K-7 (Agama) pada tanggal 2 Desember 1946, untuk menyelenggarakan

¹⁰ Hj. Djuwairiyah Djuwairiyah dan Abd. Muqit, "Perbandingan Pendidikan Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 11, no. 2 (2017): 291–306, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v11i2.185>.

¹¹ Mohd Tarmizi W, "Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia" 6, no. 1 (t.t.).

¹² Budi Haryanto, "Perbandingan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Malaysia," *Adabiyah : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2016): 81, <https://doi.org/10.21070/ja.v1i1.166>.

¹³ Suryawahyuni Latief dkk., "The Development of Islamic Education and Strengthening of National Education System of Indonesia," *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 4, no. 2 (2021): 86–99, <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v4i2.105>.

pendidikan agama di sekolah umum (sekolah negeri dan swasta); organisasinya di sekolah-sekolah agama yang dikelola oleh Kementerian Agama.¹⁴

Disusul dengan beberapa keputusan dari Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga keputusan bersama dari kedua departemen tersebut, hal ini membantu untuk menggambarkan dengan jelas keberadaan pendidikan Islam masyarakat Indonesia. Apalagi jika kita melihat realitas pendidikan Islam, dimana proses pengajaran merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan keagamaannya dalam segala aspek, pendidikan Islam dan pendidikan umum saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, Panitia Pembaharuan Kebangsaan menyatakan bahwa agama harus menjadi bagian dari sistem pendidikan Nasional. Hubungan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum terlihat lebih jelas dalam rumusan panitia selanjutnya.⁵ Keberadaannya lebih tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab IV, pada pasal 11 ayat 1 dan 6, serta sebagian penjelasannya.¹⁵

Pasal tersebut menyatakan bahwa keberadaan pendidikan Islam di Indonesia dikuatkan oleh konstitusi. Pendidikan Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan Nasional, sejauh mana pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dari yang paling rendah.

Sepanjang proses masyarakat Islam di Indonesia menjadi kerajaan Islam yang memiliki kekuatan politik, umat Islam pada saat itu menganugerahkan bahwa pendidikan adalah alat untuk mencapai tujuan hidup dan alat untuk mewariskan nilai-nilai baik (agama, budaya, dll) dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Hasan Langgulung, proses utama pewarisan terjadi melalui pendidikan. Pada masa itu, pendidikan Islam diajarkan secara informal melalui ceramah (metode menceritakan kembali) yang berkaitan dengan penyebaran Islam ke masyarakat. Pengajaran itu sendiri berlangsung di rumah, tempat suci, atau masjid. Kemudian metode berubah menjadi metode hofdelyk (langsung dan individu) dengan pelajaran yang ditentukan (membaca juz 'amma/al-Qur'an, buku-buku pembelajaran: Tauhid, Fiqh, Tafsir, Hadits). Abad ke-15 dianggap sebagai awal kemunculan pesantren (di Jawa Timur), disusul Rangkang di Aceh, Surau di Minangkabau dan Pondok di Jawa Barat. Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia tempat santri belajar ilmu agama dari seorang kyai, syekh dengan menggunakan metode sorogan (belajar sendiri-sendiri, santri datang ke guru mengambil kitab yang akan dipelajari). Guru

¹⁴ Ibrahim Bafadhol, "Lembaga Pendidikan Islam Di Indoesia," *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* 06, no. 11 (2017): 59–72.

¹⁵ Badlihisam Mohd Nasir, "Pendidikan dalam gerakan islam di malaysia:satu tinjauan" 2, no. 1 (2010).

membaca, siswa mendengarkan dan menuliskan penjelasannya. Mata pelajaran yang dipelajari biasanya berkaitan dengan keyakinan/tauhid, fiqh, membaca al-Qur'an dan Kitab-kitab Arab (kitab kuning) dalam tafsir, hadits, lughat, dll.¹⁶

Perkembangan pesantren akhirnya terganggu oleh konstitusi persekolahan umum (stbl. 118 No.4) yang didirikan oleh Belanda (pada periode Deandles). Konstitusi tersebut di atas tidak mengizinkan pengajaran mata pelajaran apa pun tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari gubernur jenderal. Sikap munafik Belanda itu dibuktikan dengan bantuan yang diberikan kepada Christian Zending di Minahasa dan Maluku untuk beroperasi secara bebas sementara peraturan ketat diberikan kepada pesantren dalam hal peraturan tata cara guru. Hal ini menimbulkan kesadaran umat Islam akan perlunya membangun sekolah umum yang mengajarkan agama, sehingga lahir gagasan untuk membangun madrasah (dengan sistem klasikal mata pelajaran umum plus agama). Madrasah pertama yang dikenal ada di Indonesia adalah madrasah adabiah di Padang (1907), didirikan oleh Syekh Amarullah Ahmad (tahun 1915), diubah menjadi HIS Adabiah dan menjadi HIS pertama yang mengajarkan mata pelajaran agama di Minangkabau). Keberhasilan pusat pendidikan ini diikuti dengan transformasi Sumatera Tawalib di Sumatera Barat menjadi madrasah pada tahun 1921 yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Amarullah. Selanjutnya beberapa ulama mendirikan madrasah di berbagai daerah di Indonesia, seperti: K.H Wahab Hasbullah dan K.H Mas Mansur (1914 di Surabaya, Rangkayo Rahmah Al Yunusiah), (1915) di Padang Panjang dan K.H Hasyim Asy'ari (1919) di Tebuireng Jombang.¹⁷

Selama periode kolonialisme Jepang, hampir tidak ada masalah. Jepang mengizinkan sekolah-sekolah ini beroperasi, tetapi guru tidak diberi gaji oleh pemerintah, dan pemerintah mengawasi setiap kegiatan politik, sampai kementerian agama didirikan (sekarang urusan agama) oleh pemerintah Republik Indonesia oleh pemerintah Republik Indonesia. PP No. 1/ SD/1946 tanggal 3 Januari 1946 yang berfungsi menangani pembangunan dan penyelenggaraan agama di lembaga keagamaan (swasta atau negara). Berdasarkan Permenag No. 7/1952 bahwa sistem pendidikan madrasah adalah sama dengan: (1) Sekolah Dasar (ibtida'iyah), belajar selama 6 tahun, (2) Sekolah Dasar (tsanawiyah), belajar selama 3 tahun, (3) Tinggi (aliyah), belajar selama 3 tahun. Selain itu juga didirikan perguruan tinggi Islam yang kemudian menjadi IAIN yang berjalan sampai sekarang, disusul oleh STAIN yang berwawasan Islam sebagai basis proses belajar-mengajar.

Madrasah tersebut (kecuali IAIN, UIN, dan STAIN) diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat (perorangan, lembaga, organisasi sosial/keagamaan) dan juga oleh anak

¹⁶ Nornajwa Ghazali, "Pendidikan Islam di Malaysia: Analisis kepentingan penghayatan mazhab Syafie," *Geografia: Malaysian Journal of Society & Space* 12, no. 4 (2016): 147-57.

¹⁷ Masyurah Mohamad Rawi, Harun Baharudin, "Diterbitkan di Malaysia Fakultas Pendidikan."

perusahaan pemerintah. Setelah dievaluasi pada tahun 1967, Departemen Agama mengubah 347 madrasah swasta menjadi madrasah negeri dengan spesifikasi: 123 Sekolah Dasar Negeri (MIN), 182 Sekolah Dasar Negeri (MTsN) dan 42 Sekolah Menengah Atas Negeri (MAN).

Pada tahun 1975 pemerintah menerbitkan Peningkatan Mutu Madrasah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Indonesia (SKB 3 Menteri), yang terdiri dari Kementerian Agama, No 6 tahun 1975, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 037/U/1975, Kementerian Dalam Negeri 36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu madrasah sebesar 30% untuk mata pelajaran agama dan 70% untuk mata pelajaran umum. Ibtida'iyah setara SD, Tsanawiyah setara SD, dan Aliyah setara SMA. Ijazah dari madrasah sama nilainya (dalam hal perdata) dengan ijazah dari sekolah umum yang sederajat, dan siswa dari madrasah dapat melanjutkan pendidikan di sekolah umum atau pindah ke sekolah umum yang setingkat dimana mata pelajaran agama yang diberikan dialokasikan pada mata pelajaran yang sama, seperti (1) Aqidah/Akhlak , (2) Ibadah/Syariah (3) Al-Qur'an/Hadits (4) Tarikh Islam.

Penyelenggaraan pendidikan Islam di sekolah umum untuk pertama kali diatur secara sah oleh instansi SKB Depag dan Depdikbud pada tahun 1946. Kemudian disusul SK berikutnya serta peraturan dan konstitusi yang digunakan. Jelasnya dalam GBPP Depdikbud tahun 1984, mata pelajaran agama dianggap sebagai mata pelajaran wajib di setiap jenjang kurikulum sekolah umum, selanjutnya menjadi program inti yang harus diikuti oleh para siswa. Akhirnya UURI tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional dengan tegas menyatakan bahwa lembaga pendidikan umum juga merupakan tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar agama.

Pendidikan di Malaysia adalah tanggung jawab federal dengan sentralisasi sistem administrasi dan dengan empat kelas manajemen, yaitu: berbagai divisi kementerian pendidikan dan departemen federal pendidikan di negara bagian, kantor pendidikan di distrik dan sekolah.

Penanggung jawab kementerian pendidikan dibantu oleh dua orang wakil menteri. Pelaksana adalah Sekretaris Jenderal pendidikan, sedangkan direktur di setiap negara bagian bertanggung jawab atas negara mereka sendiri. Pada awalnya, bahasa dan pendidikan di Malaysia selalu menghadapi kontradiksi etnis, yang menyebabkan sistem pendidikan dipecah berdasarkan kelompok etnis, sehingga sistem pendidikan nasional tidak ada pada saat itu. Pada tahun 1950, dalam upaya untuk menghindari gerakan subversif yang mengarah ke komunisme, mereka mengintegrasikan sistem pendidikan yang terpisah ke dalam satu sistem nasional. Pada awal era

proklamasi kemerdekaan tahun 1957, sistem ini diperkuat dan juga digunakan dalam sosialisasi generasi muda dari berbagai suku bangsa menjadi identitas Malaysia.¹⁸

Berdasarkan konstitusi spiritual bagian I, bagian 3, ayat 1 dan 5 dan juga pada kebijakan falsafah politik pemerintah yang berfokus pada doktrin Islam, pendidikan Islam adalah tanggung jawab negara, dalam hal ini merujuk langsung kepada raja-raja Malaysia. . Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan sejumlah uang sebagai anggaran untuk pengelolaan dan juga pendirian lembaga-lembaga Islam, untuk menyebarkan agama dan pendidikan Islam di kalangan masyarakat dan di sekolah-sekolah. Pendidikan Islam diwajibkan di setiap lembaga pendidikan. Namun pada saat itu, keberadaannya hanya dapat dilihat di sekolah-sekolah swasta yang memiliki sekitar 15 siswa Islam.

Pada tahun 1961, pendidikan Islam dapat dilihat di sekolah-sekolah negeri yang memiliki sekitar 15 siswa Islam, berdasarkan Laporan Rahman Thalib (Penyata Rahman Thalib) tahun 1961, pasal 36, ayat 1. Namun, sampai tahun 1979 agama dianggap sebagai mata pelajaran pilihan. Artinya harus diambil oleh siswa, tetapi tidak menjadi salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional. Hal ini berlangsung sampai ada peraturan dalam laporan kabinet (Laporan Jawatan Kuasa Kabinet) tahun 1979 yang mengatur ujian nasional pendidikan Islam sejalan dengan mata pelajaran lain, yang kinerjanya berada di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan Malaysia.

Pada awalnya pendidikan Islam berada di bawah kendali pemerintah daerah karena tetap berada di bawah kekuasaan raja-raja Melayu (Dicangkokkan dalam konstitusi bagian I, bagian 3, ayat 1 dan 5). Selanjutnya, setelah peluncuran dokumen resmi pada tahun 1961 berdasarkan pernyataan Rahman Thalib, pemerintah pusat mulai menggunakan kewenangannya untuk mengelola mata pelajaran dan menyelenggarakan pendidikan Islam di semua sekolah di Malaysia. Kewenangan ini dilakukan oleh seorang direktur di departemen kementerian Malaysia, dan dilakukan hanya di sekolah menengah atas, sedangkan sekolah menengah pertama berada di bawah pengawasan pemerintah dan sekolah agama (negeri dan swasta) berada di bawah pemerintah daerah tetap. Sampai tahun 1974 pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengatur mata pelajaran, sehingga pendidikan departemen kementerian memiliki kewenangan hukum yang kuat untuk mengontrol dan mengatur penyelenggaraan pendidikan Islam di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Selama ini penyelenggaraan pendidikan

¹⁸ Fachrurazi, "Examining The Expression Of Globalization And Commodification Of Islam In Indonesia," *International Journal of Scientific & Technology Research* 6, no. 12 (2017): 118–23.

Islam di lembaga-lembaga berada di bawah kewenangan langsung lembaga pendidikan tinggi, berdasarkan hak otonomi yang mereka miliki dari sisi akademik.¹⁹

Jelas bahwa keberadaan pendidikan Islam di negara Malaysia berada di bawah kendali dan regulasi pemerintah. Ia merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, sehingga tidak dapat dipisahkan darinya, dan sebagai pelajaran mempunyai hak yang sama dengan yang lain, baik dalam kurikulum maupun dalam penyelenggaraan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan ujian negara.

Jika berbicara tentang pelaksanaan pendidikan Islam di Malaysia, kita akan menemukan adanya korelasi dengan sejarah dakwah Islam di masyarakat Melayu pada awalnya. Sosialisasi ajaran Islam, khususnya akidah dan ibadah-ibadahnya, mulai menyebar dari mulut ke mulut dan kemudian dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an yang dilakukan di rumah-rumah khusus, musholla dan masjid, yang berujung pada perkembangan. Pesantren (Sekolah Pondok). Menurut Fatimah binti Ali, pendidikan Islam di Malaysia saat ini merupakan realisasi dari perkembangan pendidikan Islam tradisional.

Dalam mempelajari Al-Qur'an, mereka diberikan dasar-dasar ajaran Islam, kemampuan membaca Al-Qur'an, membaca dan menulis dalam bahasa Arab untuk mempelajari kitab-kitab seperti: tauhid, fiqh, dan hadits, sedangkan di pesantren pelajaran diberikan berdasarkan guru. ', sehingga terjadi variasi di setiap pondok pesantren. Penyampaian materi pada ketiga bentuk pendidikan tersebut mengacu pada sistem individual, dan sistem klasikal siswa ditentukan oleh penguasaannya terhadap pelajaran yang diberikan.

Hingga saat ini, lembaga pendidikan semacam ini dilaksanakan di sektor swasta baik oleh individu maupun organisasi. Awalnya, pesantren cukup disegani di masyarakat, terbukti dengan animo yang cukup besar dari banyak pihak untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah tersebut (Laporan Tahunan negara bagian Trengganu untuk tahun 1916). Hal ini berdampak positif bagi perkembangan negara di: Perak, Kelantan, Kedah, Seberang Perai, Riau dan sampai ke Johor Utara, bahkan daerah pertanian (Thailand selatan).

Perkembangan pendidikan modern pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, menurut Bilgrami dan Ashraf, masuk ke negara-negara Islam karena dominasi budaya dan politik terlepas dari tradisi pendidikan Islam dan hal ini mengakibatkan perubahan ke sistem barat sama sekali. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi pola pikir orang Malaysia sampai-sampai mereka diyakinkan bahwa sistem pesantren tidak lagi sesuai dengan kebutuhan mereka dan tidak sesuai dengan kehidupan modern.

¹⁹ Anastia Damayanti, "Pendidikan Agama Islam," *Banjarbaru: Grafika Wangi Kalimantan* 2, no. 1705045066 (2018): 66–88.

Oleh karena itu, mereka cenderung menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah yang beroperasi di bawah sistem pendidikan barat, termasuk sekolah-sekolah yang dikendalikan oleh misionaris Kristen. Pada masa krisis ini, para ahli pendidikan Islam, khususnya generasi muda Islam, mencari alternatif baru, dan ini melahirkan lembaga pendidikan yang disebut madrasah, yang memasukkan pengetahuan umum dalam kurikulum mereka selain pelajaran agama, yaitu Bahasa Inggris, Geografi, Sejarah dan Matematika. Lembaga pendidikan ini menerapkan sistem klasikal yang selama ini tidak dilakukan oleh pesantren. Penyelenggaranya adalah sektor atau institusi swasta, yang tetap berada di bawah kendali pemerintah federal.

Berdasarkan kebijakan pemerintah tentang pendidikan pada tahun 1958, tingkat menengah madrasah disetarakan dengan sekolah menengah (kemudian disebut “Sekolah Ugama”), dan dengan demikian memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidikan Malaysia rendah, sertifikat pendidikan menengah Malaysia, dan sertifikat pendidikan tinggi Malaysia. sertifikat pendidikan Malaysia. Dalam Akta Pelajaran tahun 1961 terdapat lembaga-lembaga modern lain yang disebutkan selain lembaga pendidikan Islam, yaitu: 1) Sekolah Agama Rakyat, 2) Sekolah Agama Negeri, 3) Sekolah agama yang dikelola oleh dewan agama, dan 4) Sekolah agama yang dikelola oleh kementerian pendidikan.

Sejak itu, pendidikan Islam secara resmi diamanatkan di semua sekolah umum di Malaysia. Ini adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan universitas.

Pendidikan formal di Malaysia memiliki struktur kelas 6322, yang mewakili tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, dengan demikian menentukan masa studi standar di tingkat sekolah dasar. Akan dipertimbangkan. Sudah 6 tahun. Jika Anda memiliki kelas menengah 3 tahun dan sekolah menengah pertama 2 tahun, dibutuhkan rata-rata 2 tahun untuk pindah ke tingkat perguruan tinggi. Dengan demikian, kehadiran ajaran Islam di masing-masing sekolah disesuaikan dengan struktur kelas berbasis dan pembelajaran jangka panjang.

Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan Islam di sekolah umum, madrasah, dan perguruan tinggi diatur dalam klasifikasi yang jelas. Sekolah umum berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui departemen pendidikan agama Islam departemen pendidikan. Sekolah agama ditempatkan di bawah kewenangan pemerintah daerah, sedangkan penyelenggaraan di perguruan tinggi tetap berada di bawah kewenangannya sendiri berdasarkan hak otonomi akademik yang dimilikinya. Padahal, Malaysia tidak memiliki universitas khusus keagamaan, dan International Islamic University di Malaysia adalah milik organisasi Islam, sehingga kontrol dan pengawasannya tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Malaysia.

Jelasnya, mekanisme ini dirancang dan disusun dengan mempertimbangkan baik undang-undang maupun peraturan pemerintah yang ada di bidang pendidikan.

Sebagaimana dinyatakan mayoritas Muslim, terlihat bahwa keberadaan pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia saling terkait dengan kehadiran Islam di negara-negara tersebut serta kehidupan berbangsa. Indonesia dengan falsafahnya yang terdiri dari lima prinsip (Pancasila) menjamin kebebasan beragama bagi warganya, dan Malaysia, yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara dan juga mengorientasikan kebijaksanaan pemerintah terhadap pendidikan Islam, tidak hanya di lembaga pendidikan agama tetapi juga di lembaga pendidikan umum pada semua jenjang, secara langsung melibatkan pemerintah dalam pelaksanaannya.

Bagi negara-negara yang pernah dijajah seperti Indonesia dan Malaysia, pendidikan membawa arti penting dalam perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu dalam undang-undang pendidikan masing-masing negara bagian jelas bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk membangun kecerdasan bangsa melalui warga negara yang kuat jasmani dan rohani yang usahanya dapat mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan bagi rakyat dan negara. Dalam membentuk warga negara yang utuh ini, kedua negara sepakat menjadikan nilai-nilai pendidikan Islam sebagai landasan operasional dalam upaya mewujudkannya.

Sejarah telah menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan Islam di kedua negara ini berakar pada sejarah yang sama. Dimulai dengan praktik dakwah agama Islam dan kemudian berkembang menjadi sistem Madrasah, yang disebut Sekolah Ugama di Malaysia. Kedua negara ini memiliki kesamaan dalam pelaksanaan pendidikan Islam pada pendidikan umum lembaga, di mana keduanya mengalami penindasan dari dominasi kolonial, sehingga hanya setelah kemerdekaan mereka dapat menyelesaikan tugas ini.

Saat ini Indonesia dan Malaysia telah menerapkan pendidikan Islam di sekolah umum selain sekolah agama. Pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran telah terintegrasi dalam kurikulum sekolah untuk semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga universitas.

Dari sudut pandang ini, jelas bahwa pendidikan Islam di kedua negara telah menghasilkan tokoh-tokoh Muslim terkenal sebagai bapak pendiri negara yang memainkan peran mereka untuk membangun bangsa seperti KH. Hasyim Asy'ari, Syekh Abdul Karim Amarullah, HOS. Cokroaminoto, Muhammad Nasir dll., dan di Malaysia: Tengku Abdul Razak, Datuk Hussein Onn, Mahathir Muhammad dll.

Dalam mengontrol dan mengawasi sistem, pelaksanaan pendidikan Islam di negara-negara tersebut memang menunjukkan perbedaan. Di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan Islam di sekolah umum berada di bawah kendali departemen pendidikan dan agama nasional. Sedangkan di

sekolah agama berada di bawah departemen agama. Dengan demikian, sistem pengawasan dan pelaksanaannya mengarah ke sentralisasi. Di Malaysia, penyelenggaraan pendidikan Islam di sekolah-sekolah umum, yaitu sekolah dasar dan sekolah dasar, dikendalikan oleh bagian dari kementerian pendidikan Islam atau pemerintah pusat. Untuk tingkat universitas, pelaksanaan dan pengawasan merupakan tanggung jawab universitas itu sendiri. Sedangkan di sekolah agama, pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini adalah produk langsung raja-raja Melayu yang memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan agama di seluruh negeri, termasuk yang melibatkan pendidikan Islam. Oleh karena itu di Malaysia terdapat dua sistem pelaksanaan, untuk sekolah umum berdasarkan sentralisasi dan untuk sekolah agama berdasarkan desentralisasi.

Perbedaan lain terlihat bahwa Indonesia memiliki perguruan tinggi Islam seperti IAIN dan STAIN serta perguruan tinggi Islam swasta yang dibina oleh Kementerian Agama. Namun demikian, untuk keseragaman Perguruan Tinggi di Indonesia IAIN dan STAIN juga tunduk dan dikendalikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kemudian, pada awal abad 21 beberapa IAIN telah berkembang menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) dimana fakultas-fakultas umum yang berciri khas Islam seperti Kedokteran, Sains dan Teknologi, Sastra, Sosial dan Politik didirikan. Berbeda dengan Malaysia, di mana lembaga universitas agama dianggap sebagai fakultas di bawah universitas negeri, tanpa adanya universitas swasta.

Selain itu, terdapat perbedaan lama masa studi di tingkat SD dan SMP antara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, masa pendidikan dibentuk menjadi struktur 6-3-3, yaitu 6 tahun untuk sekolah dasar, 3 tahun untuk sekolah menengah pertama dan 3 tahun untuk sekolah menengah atas. Sementara di Malaysia masa studi mencerminkan struktur 6-3-2-2, artinya 6 tahun untuk sekolah dasar, 3 tahun untuk sekolah menengah pertama, 2 tahun untuk sekolah menengah atas, dan tambahan 2 tahun untuk kursus pra-universitas. Sekolah dasar dibuat wajib sampai kelas 9.

Perbedaan yang jelas tercermin antara kedua negara menyangkut pelaksanaan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran kurikulum dan sebagai pelajaran yang membentuk bagian dari ujian negara. Di Indonesia, pendidikan Islam dijadikan sama wajibnya dengan mata pelajaran umum lainnya yang menjadi bagian dari kurikulum. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak Desember 1946, meskipun secara resmi kemudian dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IX Pasal 39 butir b. Sementara di Malaysia, kejadian seperti itu belum terjadi.

Perbandingan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia menunjukkan kesamaan sebagai berikut: pertama, sebelum implementasi kurikulum dilakukan uji coba di sekolah percontohan. Kedua, tujuan kurikulum meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya

untuk perbedaannya: pertama, nama kurikulum di Indonesia menggunakan kurikulum 2013, sedangkan Malaysia menggunakan KSSR. Kedua, prinsip kurikulum di Indonesia mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan IMTAQ, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, Beragam dan Terintegrasi, kesetaraan gender, fokus pada kompetensi peserta didik, Menyeluruh dan Berkelanjutan, Belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan, Karakteristik Satuan Pendidikan, Menghargai Perbedaan, Dinamika Perkembangan Global, Kesatuan Bangsa dan Nilai Kebangsaan, Kondisi Sosial Budaya. Sedangkan prinsip kurikulum di Malaysia lebih banyak terkait dengan pengembangan individu secara holistik, pendidikan tanpa diskriminasi, pendekatan terpadu, dan pendidikan sepanjang hayat. Ketiga, landasan pembentukan kurikulum di Indonesia bersifat yuridis dan filosofis, sedangkan Malaysia lebih pada akidah, syariah, dan akhlak. Keempat, pada desain kurikulum, KI spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan menjadi perhatian Indonesia, sedangkan di Malaysia lebih pada komunikasi, spiritual, sikap, nilai, humaniora, pengembangan fisik, estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keahlian pribadi.

KESIMPULAN

Perkembangan pendidikan modern membawa perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia, baik dalam sistemnya sendiri maupun dari segi kurikulumnya. Hal ini terjadi karena adanya pandangan yang menganggap lembaga pendidikan Islam tradisional sudah tidak mampu lagi memenuhi tuntutan masyarakat dan yang berpendapat bahwa sistem yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan modern. Dari permasalahan tersebut, muncul ide untuk membuat kurikulum pendidikan Islam di Madrasah (di Malaysia disebut Sekolah Agama), yang kemudian diikuti dengan perombakan kebijakan pendidikan di kedua negara tersebut hingga sekarang. Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam pembangunan kedua negara dan karena itu menempati posisi khusus dalam undang-undang pendidikan nasional kedua negara. Masih ada pandangan bahwa pendidikan Islam dianggap sebagai mata pelajaran kelas dua dan subordinat dari mata pelajaran pendidikan umum, tetapi karena masalah yang sama, pendidikan Islam harus memainkan peran penting dalam kehidupan pribadi. Hidup bisa dirasakan oleh setiap orang.

DAFTAR PUSTAKA

Bafadhol, Ibrahim. "Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia." *Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* 06, no. 11 (2017): 59–72.

Hasni Noor : Implementasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi)

- Bakar, M. Y. A. "Problematika Pendidikan Islam di Indonesia." *DIRASAT Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam*, 2015.
- Damayanti, Anastia. "Pendidikan Agama Islam." *Banjarbaru: Grafika Wangi Kalimantan* 2, no. 1705045066 (2018): 66–88.
- Djuwairiyah, Hj. Djuwairiyah, dan Abd. Muqit. "Perbandingan Pendidikan Islam." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 11, no. 2 (2017): 291–306. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v11i2.185>.
- Fachrurazi. "Examining The Expression Of Globalization And Commodification Of Islam In Indonesia." *International Journal of Scientific & Technology Research* 6, no. 12 (2017): 118–23.
- Hanipudin, Sarno. "Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa." *Matan : Journal of Islam and Muslim Society* 1, no. 1 (2019): 39. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>.
- Haryanto, Budi. "Perbandingan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Malaysia." *Adabiyah : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2016): 81. <https://doi.org/10.21070/ja.v1i1.166>.
- Kadir, Abdul. "Sejarah Pendidikan Islam Cite this paper Related papers." *Sejarah Pendidikan Islam: Dari Masa Rasulullah hingga Reformasi di Indonesia*, 2015.
- Latief, Suryawahyuni, Yeasy Agustina Sari, Muhammad Yusuf, Armila Armila, dan Riyan Erwin Hidayat. "The Development of Islamic Education and Strengthening of National Education System of Indonesia." *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 4, no. 2 (2021): 86–99. <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v4i2.105>.
- Lubis, Saiful Akhyar. "ISLAMIC EDUCATION IN INDONESIA AND MALAYSIA: THE EXISTENCE AND IMPLEMENTATION UNTIL 20th CENTURY." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 1, no. 1 (2017): 1–12. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v1i1.448>.
- Masyurah Mohamad Rawi, Harun Baharudin, Maimun Aqsha Lubis & Siti Aisyah Romli. "Diterbitkan di Malaysia Fakulti Pendidikan." *Proceeding The 7th International Workshop And Conference Of Asean Studies On Islamic And Arabic Education And Civilization (POLTAN -UKM-POLIMED)* 1, no. 12 (2015).
- Nasir, Badlihisam Mohd. "Pendidikan dalam gerakan islam di malaysia:satu tinjauan" 2, no. 1 (2010).
- Nornajwa Ghazali. "Pendidikan Islam di Malaysia: Analisis kepentingan penghayatan mazhab Syafie." *Geografia: Malaysian Journal of Society & Space* 12, no. 4 (2016): 147–57.
- Raco, Jozef. "Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya," 2018. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kualitatif," 2017.
- Suhid, Asmawati, Abd Muhsin Ahmad, Syaza Mohd Sabri, & Azreen, Effendy Mohamad, Jabatan Pendidikan Bahasa, Dan Kemanusiaan, dan Fakulti Pengajian Pendidikan. "Pendidikan untuk Semua: Amalannya dalam Sistem Pendidikan Islam di Malaysia." *International Journal of Education and Training (InJET) International Journal of Education and Training (InJET) International Journal of Education and Training* 1, no. 12 (2015): 1–7.
- W, Mohd Tarmizi. "Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia" 6, no. 1 (t.t.).

Hasni Noor : Implementasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi)

Wajdi, Firdaus. "Literacy Culture in the Islamic Religious Education and the Development of Islam in Indonesia." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2020): 171–88. <https://doi.org/10.21009/004.2.02>.